



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2011 – 2012
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 29 APRIL – 2 MEI 2012**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2012**

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke dua Provinsi, yang salah satunya ke Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “*mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya*”. Untuk itu, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 29 April – 2 Mei 2012.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI, khususnya permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, serta komunikasi dan informatika.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi Mitra Kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik yang menyangkut sarana dan prasarana, maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah dan Instansi Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan berikutnya.

C. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2012, dengan komposisi keanggotaan Tim sebagai berikut:

NO	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1.	H. Hayono Isman, S.IP.	PD	Anggota Tim
2.	Drs. Guntur Sasono, M.Si.	PD	Anggota Tim
3.	KRMT. Roy Suryo Notodiprodo	PD	Anggota Tim
4.	Drs. Sidharto Danusubroto, S.H.	PDIP	Anggota Tim

NO	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
5.	H. Tri Tamtomo, S.H.	PDIP	Anggota Tim
6.	Helmy Fauzy	PDIP	Anggota Tim
7.	Vanda Sarundajang	PDIP	Anggota Tim
8.	Drs. Almuzammil Yusuf	PKS	Anggota Tim
9.	H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.	PKS	Anggota Tim
10.	M. Ichlas El Qudsi, S.Si, M.Si.	PAN	Anggota Tim
11.	Dr. Effendy Choirie, M.H.	PKB	Anggota Tim
12.	Hj. Lily Chodidjah Wahid	PKB	Anggota Tim
13.	Anggrek Kurnianti, S.H.		Sekretariat Komisi I DPR RI
14.	Sugeng Riyadi		Sekretariat Komisi I DPR RI
15.	Warsi		Sekretariat Komisi I DPR RI
16.	Tubagus Erif Faturrahman		Staf Ahli Komisi I DPR RI

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. GAMBARAN UMUM KONDISI KALIMANTAN TENGAH

Kalimantan Tengah yang beribukotakan Palangka Raya memiliki luas 157.983 km² dan berpenduduk sekitar 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan atau dengan tingkat kepadatan penduduk perkilometer adalah 14 orang. Apabila dibandingkan antara luas wilayah dan kepadatan penduduk, maka jumlah penduduk di Kalimantan Tengah relatif sangat kecil. Wilayah Kalimantan Tengah didominasi oleh areal perhutanan (80%). Areal perhutanan tersebut kini sebagian besar didominasi oleh kebun kelapa sawit. Sisanya adalah perkebunan karet dan rotan rakyat yang tersebar di hampir semua daerah, sedangkan area yang berstatus hutan primer hanya 25%.

Penduduk Kalimantan Tengah terdiri dari beragam suku bangsa atau etnis/suku. Mayoritas penduduk Kalimantan Tengah adalah beretniskan Dayak yang merupakan suku asli Kalimantan Tengah. Suku lainnya adalah Suku Melayu Banjar, suku Jawa, Madura, Bugis, dan lain-lain. Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk beragamakan Islam (69,67%). Selebihnya adalah Protestan (16,41%), Hindu (10,69), Katolik (3,11%), dan Budha (0,12%). Selain itu, ada juga kepercayaan lokal yang disebut Kaharingan. Agar dianggap dan diakui sebagai salah satu agama, maka kepercayaan lokal Kaharingan tersebut disebut sebagai Hindu Kaharingan.

B. KUNJUNGAN TERKAIT BIDANG TUGAS KOMISI I DPR RI

1. BIDANG INTELIJEN (Tertutup)

2. BIDANG PERTAHANAN

Terkait tugas Komisi I DPR RI di bidang pertahanan, Tim Kunker Komisi I DPR RI menerima paparan dan penjelasan dari Mitra-mitra Pertahanan yang berada di Kalimantan Tengah. Mitra tersebut adalah Kodam XII/Tanjungpura, Korem 102/Panju Panjung, Lanal Banjarmasin, dan Lanud Iskandar. Selain mendengarkan paparan dari tiga kesatuan tersebut, Tim juga berkesempatan meninjau langsung gelar pasukan dan kesiapan Batalyon 631/Antang.

a. Kodam XII/Tanjungpura

Panglima Kodam XII Tanjungpura lebih menekankan pada aspek peran Kodam dalam mendukung Program Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait hal ini,

peran-peran yang dijalankan oleh Kodam adalah bagian dari tugas-tugas TNI dalam konteks operasi militer selain perang. Peran-peran yang dilakukan oleh Kodam XII/Tanjungpura dalam mendukung program pembangunan, seperti program pendidikan, kerja bakti, dan lain sebagainya atau yang dikenal dengan sebutan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)

Dalam kesempatan ini juga Pangdam memaparkan soal hubungan atau kerja sama TNI di lingkungan Kodam XII/Tanjungpura dengan pihak Kepolisian RI, khususnya dalam tugas bantuan penegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas ini merupakan bagian dari OMSP yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.

Sinergitas antara TNI dan Polri di Kalimantan Tengah berjalan baik walaupun pada saat ini terdapat dinamika negatif yang banyak terjadi di beberapa wilayah yang melibatkan aparat TNI dan Polri. Hubungan baik dijalin melalui adanya program bersama yang melibatkan TNI dan Polri secara kelembagaan.

b. Korem 102/ Panju Panjung

Korem 102/Panju Panjung atau Korem 102/PP merupakan Komando Resort Militer (Korem) dibawah komando Kodam VI/Tanjungpura. Sebelum terbentuknya Korem 102/Panju Panjung, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah Kodam XI/Tambun Bungai yang berdiri sejak tanggal 17 Juli 1958, dengan inti kekuatan Yonif 603/Tanjungpura (sekarang Yonif 631/Antang). Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/B/07/ III/1974 tanggal 18 Maret 1974, Kodam XI/Tambun Bungai di likuidasi, sebagai penggantinya pada tanggal 23 Maret 1974 diresmikan pembentukan Korem 102/Panju Panjung yang bergabung dengan Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Korem 102/PJG Meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawahi 6 Kodim 1 Yonif, 1 tim intel, 8 balakaju, dan 6 balakrem.

Dalam menjalankan tugasnya, Korem 102/PJG, baik Atkowi maupun Satpur memiliki beberapa persoalan atau kendalanya meliputi jumlah kekuatan personel, kesiapan alutsista, dan persoalan perumahan atau pangkalan. Dibandingkan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab tugasnya, yaitu 153.564 km² atau satu setengah kali luas pulau Jawa, maka berbagai kelengkapan dan kesiapan yang ada pada Korem 102/PJG jauh dari memadai dan sangat kekurangan. Demikian juga jumlah personel yang dibutuhkan masih belum tercukupi. Terkait Alutsista, jumlah dan kondisi senjata, amunisi, kendaraan bermotor, alat optik, alat komunikasi belum sesuai dengan TOP/DSPP. Kondisi sarana prasana pangkalan atau perumahan prajurit juga setali tiga uang, atau masih jauh dari layak. Berikut adalah penjelasan

kondisinya.

1) Kekuatan Personel

Korem 102/PJG diperkuat oleh personel, baik dari militer maupun sipil. Jumlah yang ada tidak sesuai dengan TOP/DSPP, sehingga secara keseluruhan Korem masih banyak kekurangan personel. Akibatnya, kekuatan personel di setiap pos tidak utuh. Untuk mensiasatinya, maka dilakukan mekanisme bantuan dari satu pos ke pos yang lain apabila diperlukan.

2) Kesiapan Alutsista

a) Kesiapan Alutsista Satkowil

Kondisi kesiapan alutsista di satuan komando kewilayahan tidak terpenuhi seluruhnya, atau hanya 26,44% dari DSPP (untuk senjata), dan 38,64% (untuk amunisi).

b) Kesiapan Alutsista Satpur

Meski relatif lebih baik, kondisi kesiapan Alutsista di satuan tempur juga tidak berbeda dengan di Satkowil, yaitu tidak terpenuhi sesuai kebutuhan yang ada, atau hanya 67,5%.

c) Kendaraan Bermotor

d) Kendaraan Bermotor Satkowil

Seperti halnya kesiapan Alutsista, kondisi dan kesiapan kendaraan bermotor di Satkowil tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Dari jumlah kendaraan yang ada, kondisinya tidak semuanya dalam keadaan baik. Beberapa diantaranya sebenarnya sudah tidak layak pakai, namun tetap digunakan karena terpaksa.

e) Kendaraan Bermotor Satpur

Demikian pula kondisi kendaraan satuan tempur di bawah komando Korem 102/PJG, kondisinya masih mengalami kekurangan, khususnya kendaraan roda empat yang hanya mencapai 75% dari kebutuhan. Untuk roda dua jumlahnya mencapai 100% dari kebutuhan. Namun demikian, dari total kendaraan yang ada, baik roda empat maupun roda dua, kondisinya sebagian besar sudah banyak yang tidak layak pakai, namun tetap dipaksakan. Jika dibandingkan dengan kondisi kendaraan yang dimiliki kepolisian, umpamanya, kendaraan milik Korem 102/PJG jauh di bawah standar.

f) Rumah Dinas

Idealnya, setiap prajurit memiliki rumah dinas yang lokasinya tidak jauh dari pangkalan. Hal ini diperlukan agar ketika terjadi mobilisasi atau terjadi keadaan

darurat, pasukan dapat disiap siagakan dalam waktu relatif cepat. Yang terjadi saat ini, tidak semua prajurit memiliki rumah dinas dan lokasinya terpencar, jauh bahkan terpencil. Kondisi ini diperparah dengan persoalan bahwa kondisi transportasi maupun sarana prasana perhubungan yang ada aksesnya tidak lancar dan cepat. Sehingga apabila diperlukan mobilisasi dan kondisi kontingensi, diperlukan waktu yang cukup lama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diambil kebijakan dimana prajurit yang belum menikah diharuskan tinggal di barak.

Jumlah rumah dinas Satkowil seharusnya adalah 2695 unit, sesuai dengan jumlah personel yang ada. Kenyataannya, rumah dinas yang ada hanya 721 unit dimana 33 unit masih ditempati para purnawirawan dan 1 unit untuk posyandu. Dari jumlah tersebut, hanya 13 unit yang kondisinya masih dalam keadaan baik. Sisanya rusak ringan dan berat.

Untuk Satpur, jumlah rumah dinas ideal seharusnya 662 unit tetapi hanya tersedia 362 unit. Dari jumlah tersebut, hanya 9 unit yang dapat dikatakan dalam kondisi baik. Sisanya dalam kondisi rusak ringan.

Rumah Dinas	DSPP	NYATA	Kurang	Kondisi Rumdis Yang ada			Keterangan
				Baik	RR	RB	
Satkowil	2695	721	1974	13	679	29	<ul style="list-style-type: none"> - 33 unit ditempati purnawirawan - 1 unit untuk posyandu
Satpur	992	362	300	9	353		

Berdasarkan data tersebut, maka perumahan yang harus disediakan untuk prajurit tidak hanya menyediakan kekurangan, yaitu 2274 unit, tetapi juga meronivasi seluruh rumdis yang dalam kondisi rusak, dan membangun kembali rumah dinas yang dalam kondisi rusak berat.

c. Lanal Banjarmasin

Lanal Banjarmasin adalah satuan pelaksana Lantamal VI yang bertugas pokok menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur Koarmatim dan unsur-unsur Kotama Lakpus TNI AL lainnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Kondisi Alutsista, peralatan persenjataan, kendaraan bermotor, alat komunikasi, baik secara kuantitas maupun kualitas secara umum masih kurang memadai

apabila dihadapkan dengan luasnya wilayah operasional Sional Banjarmasin, mulai dari Kalsel sampai daerah Kalteng yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalbar.

- 2) Perumahan prajurit masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, mengingat kondisi bangunan banyak mengalami kerusakan.

d. Lanud Iskandar

Lanud Iskandar merupakan salah satu satuan pelaksana Koopsau II dengan tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan operasi satuan dalam jajarannya, pembinaan potensi kedirgantaraan serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya, baik OMP maupun OMSP. Seperti halnya Korem 102/PJG dan Lanal Banjarmasin, Lanud Iskandar juga memiliki banyak kendala terkait Alutsista, kondisi perumahan, maupun kendaraan bermotor lainnya. Dalam hal ini, terkait keterbatasan waktu, Lanud Iskandar tidak dapat memaparkan secara detil bagaimana persoalan yang dihadapi tersebut serta bagaimana cara mengatasinya.

3. BIDANG KOMINFO

Dibidang Kominfo, Komisi I DPR RI menerima paparan dari beberapa unsur Kominfo, yaitu RRI, TVRI, Loka Monitor, PT. Pos, KPID, dan Operator Telepon Seluler di Kalimantan Tengah (PT. Telkom, PT. Indosat, dan XL Axiata). Paparan dilaksanakan di studio TVRI Kalimantan Tengah dan disiarkan secara langsung kepada publik. Berikut adalah beberapa persoalan yang dihadapi unsur Kominfo di Kalimantan Tengah:

a. TVRI Provinsi Kalimantan Tengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi TVRI Kalimantan Tengah, antara lain :

- 1) Minimnya dukungan anggaran operasional dan anggaran untuk perbaikan teknik. Dengan total produksi paket acara yang mencapai 30 lebih perminggu, TVRI Kalimantan Tengah hanya mampu memberikan anggaran tidak lebih dari 1 juta rupiah untuk setiap paket acara.
- 2) Kurangnya personel atau SDM serta rendahnya tingkat kesejahteraan. Saat ini TVRI didukung oleh 102 orang yang terdiri dari 33 orang PNS dan sisanya non-PNS. Mereka yang berjumlah PNS usianya banyak yang telah mendekati masa pensiun sementara penggantinya belum ada. Akibat minimnya anggaran yang ada, tingkat kesejahteraan SDM yang non PNS sendiri sangat rendah
- 3) Minimnya sarana dan prasarana seperti:
 - a) Peralatan dan luas studio yang kurang representatif
 - b) Usia perlengkapan yang sudah tua atau usang
 - c) Pemancar VHF di 12 kabupaten 75% kondisinya menurun di bawah 50%

d) Perlengkapan/peralatan OB Van Studion yang kurang memadai.

b. RRI Provinsi Kalimantan Tengah

Beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Masih terdapat wilayah di Palangka Raya yang mengalami *blank spot*, karena belum memiliki stasiun *relay* dan peralatan *up link* sebagai distribusi audio dalam keadaan rusak dan tidak dapat diperbaiki karena ketiadaan *sparepart*.
- 2) Prasarana yang dimiliki cukup memadai, namun perlu dipikirkan untuk dilakukan segera regenerasi dalam rangka menjawab tantangan dan perubahan kemajuan teknologi, seperti komputer dan jaringan internet dan masih minimnya/belum standar peralatan yang digunakan untuk operasional pada acara-acara dialog interaktif/*talk show*.
- 3) Dari segi kualitas SDM yang ada masih perlu ditingkatkan kemampuannya, terbatasnya tenaga-tenaga yang kreatif di bidang penyiaran, khususnya sebagai penyiar serta tingkat kemampuan SDM yang masih belum merata, baik ditinjau dari pendidikan formal maupun non formal.
- 4) Minimnya anggaran baik untuk program maupun untuk fisik.

Dalam kesempatan ini, Tim Kunker DPR RI melakukan kunjungan langsung ke lokasi pemancar RRI. Dari hasil peninjauan ini, disampaikan bahwa lahan lokasi pemancar sangat luas, yaitu 10 ha namun dengan kondisi yang tidak terawat dan terpelihara, karena minimnya anggaran yang disediakan. Hal lain yang melahirkan kekhawatiran adalah lokasi ini tidak memiliki pagar pembatas, sehingga di beberapa lokasi sudah diserobot oleh warga untuk mendirikan rumah. Apabila kondisi ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan melahirkan konflik lahan antara RRI dan warga yang membangun pemukiman di areal tersebut.

c. KPID Provinsi Kalimantan Tengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPID Kalimantan Tengah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman yang masih rendah dari masyarakat, khususnya pegawai/pejabat yang membidangi kominfo, terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 2) Terdapat inkonsistensi penyelenggaraan Undang-Undang dengan pelaksanaan proses perizinan, belum adanya kepastian hukum di bidang perijinan, dimana terdapat dualisme dalam pemberian ijin siaran di daerah. Hal ini berdampak terhadap keberadaan para penyelenggara siaran.
- 3) Masih banyak lembaga penyiaran yang belum berizin, namun tetap beroperasi, termasuk lembaga penyiaran publik lokal yang berada di bawah naungan Pemda.

Hal ini terjadi akibat adanya dualisme dalam pemberian perijinan di Provinsi Kalteng, yaitu adanya peraturan dari Depkominfo dimana Infokom daerah dapat pula memberikan perijinan. Hal ini dirasakan sangat bertentangan dengan amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

- 4) Mekanisme perizinan dinilai sangat lamban, karena terkonsentrasi di pusat.
- 5) Peran dan wewenang KPID masih lemah, sehingga perlu diperkuat melalui revisi UU No. 32 Tahun 2002.
- 6) Sarana dan prasarana serta anggaran operasional masih dipinjamkan melalui Pemda dan dinas Infokom di daerah.

d. PT. POS IX Kalimantan

Wilayah usaha Pos IX Kalimantan meliputi 4 provinsi, yang salah satunya adalah Provinsi Kalteng. Dalam menjalankan kegiatannya Kantor Pos IX, Kalimantan menghadapi permasalahan, antara lain:

- 1) Cakupan wilayah yang sangat luas dengan banyaknya lokasi terpencil yang harus dijangkau dengan tingkat kesulitan transportasi yang cukup berat. Sebagai contoh, di salah satu wilayah, PT. Pos hanya buka pada tanggal 3 – 6 saja setiap bulannya dengan tujuan hanya untuk melayani pembayaran 10 orang pensiunan.
- 2) Lokasi terpencil dan jauh dari lingkungan masyarakat sekitar menjadikan PT Pos rawan bagi terjadinya tingkat kejahatan. Pada tahun 2011, terjadi perampokan terhadap armada PT Pos yang membawa uang. Demikian juga pada tahun 2012, terjadi kembali peristiwa perampokan yang memakan korban jiwa. Hingga saat ini, kasus tersebut tidak terungkap karena kurangnya bukti dan tidak adanya saksi.

e. Loka Monitor

Beberapa hal yang menjadi kendala Loka Monitor Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah:

- 1) Wilayah Kalimantan Tengah yang luas tidak didukung oleh jumlah SDM yang kualitas dan kuantitasnya memadai.
- 2) Topografi wilayah Kalimantan Tengah yang terdiri dari hutan, sungai dan rawa, sehingga sulit untuk dijangkau dan menyulitkan Loka Monitor dalam melakukan tugas pengawasan.
- 3) Kesulitan dalam berkoordinasi dengan instansi atau organisasi lain, karena struktur organisasi UPT yang masih sekelas Loka.
- 4) Fasilitas pendidikan yang kurang memadai, sehingga menghambat upaya peningkatan kualitas SDM.

f. Operator Telekomunikasi

Beberapa hal yang menjadi kendala bagi para Operator Telekomunikasi di wilayah Kalimantan Tengah adalah:

- 1) Luasnya cakupan area yang menjadi tanggung jawab operator, sementara penghuni area tersebut tidak banyak, sehingga secara ekonomis kondisi ini kurang menguntungkan, tetapi secara moral perusahaan tetap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jaringan operator.
- 2) Luasnya area cakupan tidak didukung oleh sarana dan prasarana transportasi, seperti lalu lintas perairan yang tidak menentu, jalan darat yang rusak, dan lain sebagainya.
- 3) Minimnya kuota BBM di Kalimantan Tengah mempengaruhi kinerja Operator.
- 4) Suplai listrik yang belum baik dari PLN. Saat ini, power listrik sebagian besar harus disediakan secara mandiri melalui genset (60%) dengan resiko pembelian BBM yang sangat tinggi dan mahal, sementara PLN hanya dapat mensuplai 40% saja dari kebutuhan listrik.

Terkait dengan bidang Kominfo, dalam kesempatan Kunjungan Kerja ini Komisi I DPR RI melakukan peninjauan langsung ke kantor Telkom Palangkaraya. Dalam hal ini, Tim Kunker Komisi I DPR RI berkesempatan meninjau langsung keberadaan kesiapan Mobil Pusat Layanan Informasi Kecamatan atau MPLIK yang ada di Lapangan PT. Telkom Palangkaraya.

MPLIK merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat, murah. Tujuannya adalah melayani daerah-daerah kecamatan yang belum terjangkau akses internet, Penyediaan Mobil layanan internet kecamatan (M-PLIK) merupakan amanat dari Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyedia Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/12/2010.

Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan merupakan gebrakan baru dari Kemenkominfo untuk memasyarakatkan internet dan meng-internet-kan masyarakat. MPLIK ini merupakan kelanjutan dari program *Universal Service Obligation* (USO) melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Perbedaan antara MPLIK dan PLIK adalah dari segi mobilitas. PLIK ditempatkan di rumah, koperasi, tempat usaha, ataupun di suatu tempat khusus atau bisa digambarkan, seperti warnet, sedangkan MPLIK merupakan perangkat layanan internet yang ditempatkan di dalam mobil, sehingga bisa berpindah-pindah tempat. Jumlah MPLIK di seluruh Indonesia adalah sebanyak 1.907 unit. Di dalam paket MPLIK ini tersedia 1 VSAT (*Very Small Aperture Terminal*), 1 modem, 1 Server, 6

Laptop, UPS, DVD player, TV LCD, Genset untuk menyediakan listrik dan 1 buah mobil untuk mengangkut semua perangkat itu.

Dengan adanya MPLIK ini, diharapkan masyarakat Indonesia yang berada di lokasi terpencil sekalipun mampu memperoleh atau mengakses informasi. Apabila program ini bisa terlaksana dengan baik, maka dampak yang dapat dirasakan adalah kesamaan pengetahuan dan persepsi tanpa mempedulikan letak geografis penduduk Indonesia.

Untuk menjalankan program MPLIK ini Kemenkominfo melakukan tender dalam pengadaannya. Dari beberapa sumber yang dapat diperoleh, pemenang tender MPLIK bukan hanya satu perusahaan saja, melainkan banyak perusahaan, seperti PT. Wira Eka Bhakti, PT. Lintas Arta, dan PT. Telkom. PT Telkom sendiri memenangi 6 paket pekerjaan MPLIK yaitu:

- a. Paket 4, (Jambi, Riau, Kepri): 114 unit
- b. Paket 12 (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo): 111 unit
- c. Paket 13 (Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara): 84 unit
- d. Paket 14 (Sulawesi Selatan): 105 unit
- e. Paket 17 (Kalimantan Tengah): 98 unit
- f. Paket 20 (Papua dan Irian Jaya Barat): 76 unit, serta
- g. Kontrak Penyediaan Jasa Internet Exchange (IX) Provinsi KPU/USO Paket Pekerjaan 3 (Makassar dan Balikpapan).

Apabila berjalan lancar, estimasi revenue dari paket MPLIK yang dilaksanakan oleh Telkom dapat mencapai 500 milyar rupiah.

Berdasarkan alokasi yang ada, Kalimantan tengah mendapatkan 98 unit MPLIK yang akan disebar ke berbagai kabupaten atau kecamatan. Hingga kini, Kalimantan Tengah baru mendapatkan tujuh unit mobil untuk MPLIK yang diserahkan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi ke Pemprov Kalteng sejak Desember 2011. Namun demikian, ketujuh mobil tersebut belum dapat dioperasikan karena belum dilengkapi oleh paket-paket yang seharusnya sudah ada, sehingga tidak dapat beroperasi. Mobil-mobil tersebut juga hanya diletakkan di lapangan Telkom Palangkaraya tanpa perlindungan, seperti *shelter* atau kain penutup/terpal serta tidak terawat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan fisik kendaraan kerosok dan rusak serta tidak dapat digunakan pada waktunya.

Akibat tidak beroperasinya MPLIK, maka program layanan masyarakat terkait penyediaan jaringan atau fasilitas internet berjalan di setiap kecamatan terbengkalai. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kemkominfo dan PT. Telkom sebagai pemenang tender untuk wilayah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, kondisi ini tidak hanya terjadi pada MPLIK di Kalimantan Tengah, tetapi di banyak tempat. Bahkan di beberapa provinsi, kondisinya jauh lebih buruk dimana kendaraan yang seharusnya sudah dikirim, ternyata belum dapat diwujudkan, atau baru sebagian yang dikirim dengan kondisi yang tidak dilengkapi oleh perlengkapan sebagaimana telah ditetapkan, sehingga program yang telah dicanangkan sejak tahun 2009/2010 hingga kini banyak terbengkalai dan kurang transparan pertanggungjawabannya atau terjadi adanya berbagai potensi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kontrak yang melibatkan PT. Telkom, penandatanganan kontrak dilakukan pada akhir Desember 2010 dan seharusnya telah berakhir atau tuntas antara bulan September hingga Desember 2011 (bervariasi sesuai tingkat kesulitan). Dalam pelaksanaannya, PT. Telkom kembali melakukan sub kontrak dengan 3 (tiga) perusahaan untuk pengadaan MPLIK tersebut. Perusahaan-perusahaan itu adalah:

- a. GEOSYS (untuk penyediaan mobil, karoseri berikut penirimannya)
- b. PT. PRAMINDO IKAT NUSANTARA (untuk kelengkapan perangkat dan operasional)
- c. PT. METRASAT (untuk penyediaan perangkat VSAT dan komunikasi data)

Hingga November 2011, GEOSYS hanya memesan 174 unit Toyota Dyna dan 84 unit Isuzu (dari 588 unit yang seharusnya dipesan). Pada bulan November 2011, GEOSYS diambil alih oleh MICRONICS. Dari 53 unit Isuzu, yang tersisa hanya 31 unit saja. 53 unit lainnya dijual karena komitmen bermasalah dari GEOSYS. Dari 174 unit Toyota, yang sudah selesai Karoseri 130 unit, 44 unit lainnya dalam proses pengerjaan. Sementara untuk 31 unit Isuzu semuanya telah selesai karoseri. Pada tahap selanjutnya Micronics memesan 135 unit Chassis Toyota. Dengan demikian, kondisi unit mobil untuk kendaraan MPLIK saat ini adalah:

- a. Selesai Chassis + Karoseri : 205 unit
- b. Selesai Chassis : 135 unit
- c. Belum sama sekali : 248 unit

Dengan kondisi seperti ini, maka perkiraan penyelesaian pemenuhan mobil untuk MPLIK belum dapat dipastikan selesai hingga tahun 2012 ini. Padahal kesepakatan awal disebutkan bahwa kontrak berakhir pada tahun 2011. Penundaan operasional MPLIK akan lebih panjang, karena paket atau sarana prasarana dalam mobil MPLIK juga banyak mengalami permasalahan, seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kekhawatirannya adalah ketika mobil telah tersedia dan perangkat layanan internet telah dipasang, mobil telanjur rusak akibat rusak dan tidak ada biaya pemeliharaan.

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa program MPLIK memiliki banyak penyimpangan dan permasalahan, sementara instansi terkait, khususnya Kemkominfo dan PT. Telkom tidak memiliki *sense of crisis*, tidak efisien, tidak *capable*, dan tidak

akuntabel yang menimbulkan beban dan biaya tinggi serta kerugian negara. Lebih jauh, keterlambatan dan penyimpangan ini melahirkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap pemerintah.

Terkait hal tersebut, maka Komisi I DPR RI perlu memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengadaan MPLIK ini, yaitu Kemkominfo dan para perusahaan pemenang tender untuk meminta klarifikasi. Klarifikasi ini penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik serta sebagai upaya pelaksanaan wewenang Komisi I DPR dalam bidang pengawasan. Beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait MPLIK adalah mekanisme tender, pemilihan pemenang tender, komitmen ketepatan waktu, komitmen pemenuhan barang dan jasa, kesesuaian spek perlengkapan MPLIK, audit keuangan, serta lain sebagainya.

BAB III

KESIMPULAN, SARAN-REKOMENDASI DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan maupun tinjauan langsung yang dilakukan oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI terhadap kesiapan sumber daya manusia serta sarana maupun prasarana yang ada pada beberapa mitra kerja di Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi I DPR RI menyimpulkan bahwa sebagian besar kondisinya masih jauh dari kondisi ideal. Untuk itu, perlu adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan pada sektor peningkatan SDM, pemenuhan logistik/perlengkapan/sarana/prasana, serta peningkatan kesejahteraan.

Khusus dengan situasi pembangunan dan sosial kemasyarakatan, berdasarkan laporan dari BINDA setempat, paparan Gubernur, Polda, dan hasil pengamatan langsung terhadap realitas di lapangan, persoalan kelangkaan BBM dapat menjadi potensi ancaman yang sangat besar yang dapat melahirkan konflik, sehingga Komisi I DPR RI mendesak pemerintah agar segera menambah jumlah kuota BBM untuk wilayah Kalimantan.

Untuk bidang pertahanan, pada saat ini, bidang pertahanan diprioritaskan pada peningkatan Alutsista dengan dukungan anggaran yang sangat besar, tetapi mengabaikan persoalan kesejahteraan dan dukungan logistik bagi para personel dan keluarganya, seperti dukungan perumahan atau kendaraan dinas. Teknologi (alutsista) yang baik tanpa didukung oleh manusia (prajurit TNI) yang sejahtera sebagai operator atau *user* di lapangan tidak akan menghasilkan produk atau tujuan seperti yang diharapkan: *not the gun behind the man but the man behind the gun*. Karena itu, selain adanya prioritas terhadap peningkatan Alutsista, juga perlu diperhatikan kesejahteraan bagi para prajurit dan keluarganya.

Dalam bidang komunikasi, beragam persoalan berat banyak ditanggung oleh Mitra Kerja Komisi I DPR RI terkait minimnya dukungan anggaran, luasnya wilayah yang harus dijangkau, kondisi sarana prasana yang kurang mendukung, tingkat keamanan yang rawan, dan lain sebagainya. Selain itu, Tim Kunker Komisi I DPR RI ini juga menemukan beberapa kejanggalan, khususnya pengadaan MPLIK yang tidak sesuai dengan harapan dan program.

B. SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT

Terkait dengan laporan dan hasil temuan tersebut di atas, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan saran kepada pemerintah pusat untuk segera memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan para pelaksana tugas Mitra Kerja Komisi I di Provinsi Kalimantan

Tengah. Berdasarkan hal tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR menyampaikan berbagai rekomendasi sebagai berikut:

1. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

- a. Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI mendukung upaya Gubernur Kalteng kepada Pemerintah Pusat, khususnya BPH Migas, agar menambah kuota BBM atau menghentikan pasokan kekayaan dan produksi alamnya.
- b. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat hendaknya tidak mengabaikan keadaan dan kondisi masyarakat di pedalaman, berikut juga meningkatkan perhatian terhadap kawasan dan lingkungan masyarakat pedalaman tersebut dengan cara melindungi kawasan hutan, perlindungan alam, dan lingkungan.
- c. Menjaga agar kerukunan umat beragama dan antar suku/golongan tetap harmonis.
- d. Mampu menyelesaikan sengketa lahan dengan mengedepankan hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat.

2. BIN DAERAH KALIMANTAN TENGAHDAN BARAT (Tertutup)

3. BIDANG PERTAHANAN

- a. Beberapa konflik antar TNI dan Polri di beberapa daerah terjadi akibat adanya kecemburuan dan kesenjangan kesejahteraan antara dua aparaturnegara tersebut. Karena itu, Komisi I DPR RI minta pemerintah agar segera mempehatikan tingkat kesejahteraan prajurit TNI, khususnya pemenuhan rumah dinas. Rumah dinas yang kini ditempati direnovasi dengan dana swadaya dan tanpa ada bantuan dari pusat. Sebagian rumah dinas yang ada tidak lagi layak untuk ditempati dan perlu segera untuk dibangun rusunawa atau rusunami.
- b. Pemerintah segera memenuhi jumlah personel di berbagai satuan yang kurang memenuhi TOP/DSSP

4. BIDANG KOMINFO

- a. Mitra di bidang Kominfo agar meningkatkan pelayanannya di masyarakat menjadi semakin baik. Sebagai lembaga publik, maka pengutamakan harus ditekankan pada faktor pelayanan publik secara prima bukan pada aksi *profit taking*.
- b. Untuk mensiasati persoalan anggaran, bidang kominfo perlu melakukan kreatifitas yang dapat menguntungkan semua pihak. Contohnya, bekerja sama dengan beberapa perusahaan sebagai bentuk CRS atau USO untuk mendanai beberapa program kominfo. Sebagai kontra prestasinya, bidang kominfo yang bersangkutan dapat mempromosikan perusahaan tersebut.
- c. Terkait MPLIK, Komisi I DPR RI perlu memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengadaan MPLIK ini, yaitu Kemkominfo dan perusahaan pemenang tender untuk meminta klarifikasi. Klarifikasi ini penting dilakukan sebagai bentuk

pertanggungjawaban publik serta sebagai upaya pelaksanaan wewenang Komisi I DPR dalam bidang pengawasan. Beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait MPLIK adalah mekanisme tender, pemilihan pemenang tender, komitmen ketepatan waktu, komitmen pemenuhan barang dan jasa, kesesuaian spek perlengkapan MPLIK, audit keuangan serta lain sebagainya.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012. Kami harapkan hasil Kunjungan Kerja tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.

Jakarta, 2 Mei 2012

TIM KUNKER KOMISI I DPR RI KE
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

H. HAYONO ISMAN, S.IP.
A-450